**BULETIN ILMIAH MARINA**
SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>

p-ISSN: 2502-0803

e-ISSN: 2541-2930

Nomor Akreditasi: 30/E/KPT/2019

KINERJA PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA***The Performance of Capture Fisheries Development in Indonesia******Kusdiantoro¹, Achmad Fahrudin², Sugeng Hari Wisudo² dan Bambang Juanda¹**¹Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Diterima tanggal: 2 September 2019 Diterima setelah perbaikan: 5 November 2019

Disetujui terbit: 2 Desember 2019

ABSTRAK

Di Indonesia, sub sektor perikanan tangkap memiliki peran penting bagi pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap masih menghadapi permasalahan yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji capaian kinerja pembangunan perikanan tangkap di Indonesia yang dilihat dari beberapa aspek indikator makro. Penelitian ini menggunakan data sekunder, terutama indikator makro, seperti PDB, produksi, NTN (Nilai Tukar Nelayan), infrastruktur perikanan tangkap dan ekspor-impor yang dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perikanan tangkap di Indonesia secara umum masih di dominasi nelayan skala kecil. Pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2018 hanya mencapai 47,27% dari target. Capaian NTN tahun 2018 diatas 100, artinya ada peningkatan kesejahteraan nelayan. Kinerja perikanan tangkap didukung 538 fasilitas terkait pelabuhan atau pendaratan ikan untuk bongkar muat hasil tangkapan. Meskipun kinerja ekspor produk perikanan Indonesia (HS03) menunjukkan penurunan, tetapi indeks RCA tahun 2018 sebesar 2,83 (>1) yang menunjukkan *export performance* produk perikanan memiliki keunggulan komparatif pada peta perdagangan dunia.

Kata Kunci: indikator makro; kinerja pembangunan; perikanan tangkap**ABSTRACT**

In Indonesia, the capture fisheries sub-sector has an important role for national development. However, the implementation of capture fisheries development still faces considerable problems. This study aims to assess the performance achievements of capture fisheries development in Indonesia as seen from several aspects of macro indicators. This study was used secondary data, mainly macro indicators, such as GDP, production, NTN (Fisheries Exchange Rate), capture fisheries infrastructure and export-import that were descriptively analyzed. The analysis shows that capture fisheries in Indonesia are generally still dominated by small-scale fishermen. Fisheries GDP growth in 2018 only reached 47.27% of the target. NTN's achievements in 2018 are above 100, meaning that there is an increased in the welfare of fishermen. Capture fisheries performance is supported by 538 ports or fish landing facilities for loading and unloading catches. Although the export performance of Indonesian fishery products (HS03) was declined, the RCA index in 2018 was 2.83 (> 1), that the export performance of fishery products has a comparative advantage on the world's trade map.

Keywords: macro indicators; development performance; capture fisheries

*Korespondensi penulis:

Email: diantoro.domiri@gmail.comDOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v5i2.8053>

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan suatu negara atau wilayah sejatinya membutuhkan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Keberhasilan pembangunan sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif multidimensi, baik dari aspek sosial, budaya, hukum, keamanan dan ekonomi. Aspek ekonomi sering kali digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan capaian pembangunan karena memiliki banyak indikator penilaian yang dapat berpengaruh pada seluruh aspek pembangunan (Todaro & Smith, 2006). Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum bagi masyarakat karena dapat mudah diukur secara kuantitatif dan menstimulus aspek pembangunan lainnya (Mopangga, 2010).

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan adalah perikanan. Adrianto (2005) berpendapat bahwa perikanan memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi, tidak hanya bagi masyarakat di sekitar lingkungan sumber daya, tetapi juga meliputi suatu kawasan atau komunitas tertentu. Menurut Bappenas (2014), sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Indonesia yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Daryanto (2007) menyebutkan bahwa perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada empat kenyataan. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan besar, baik secara kuantitas maupun diversitas. Kedua, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan terakhir Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang dimiliki.

Selama ini, sektor perikanan dianggap telah teruji sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi krisis dan mampu menyediakan bahan pangan (sumber protein ikan) bagi masyarakat, sumber pendapatan serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di

beberapa negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan negara-negara Eropa. Sejalan dengan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan di beberapa negara telah menjadi sumber "energi" pertumbuhan ekonomi dan "mesin pertumbuhan" ekonomi regional. Bahkan di beberapa negara lainnya, ikan secara "budaya" menjadi bagian hidup. Peran sektor perikanan di beberapa negara ditandai dengan peningkatan produksi dunia secara signifikan.

Pembangunan sektor perikanan dapat diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber daya hayati perikanan dan sumber daya perairan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya seiring dengan pengembangan dan penerapan IPTEK, pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan devisa negara disertai upaya-upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber daya hayati dan lingkungan lestari (KKP, 2007). Pembangunan perikanan tidak hanya untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran, namun merupakan basis ekonomi nasional yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam perdagangan internasional (Kurniawan, 2010). Menurut Bappenas (2016), terdapat berbagai isu dalam pengelolaan perikanan tangkap seperti *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* (IUU Fishing), rendahnya produktivitas dan daya saing. Dalam teori pertumbuhan neo klasik yang dikemukakan Solow dalam Mankiw (2007) menyebutkan output perekonomian penting dan menjadi salah satu faktor dalam pembangunan adalah modal. Sementara itu, Kuznets dalam Todaro & Smith (2006) mengatakan suatu rangkaian struktur ekonomi saling terkait dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor-impor), produksi, tenaga kerja dan modal. Faktor produksi, tenaga kerja dan modal menjadi faktor penting dan menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Peranan perikanan dalam pembangunan dapat ditingkatkan, apabila potensi sumber daya ikan dapat dikelola secara baik dengan didukung beberapa modal, seperti sumber daya manusia, sosial (nilai dan norma kelembagaan), finansial (potensi ekonomi daerah), sumber daya fisik (sarana dan prasarana) dan politik (kebijakan legislatif).

Dalam analisis makro, keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur dari perkembangan pendapatan nasional yang dicerminkan dengan investasi dan semua faktor input, seperti sarana

dan prasarana (Sukirno, 2000). Pendapatan domestik bruto (PDB) dapat menjadi indikator keberhasilan capaian pembangunan perikanan karena pertumbuhan PDB dapat menggambarkan besarnya pendapatan yang dicapai masyarakat (Sutiardi, 2001). Pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini ditunjukkan oleh PDB yang selanjutnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Soemokaryo, 2001). Berdasarkan uraian diatas, kajian ini dibatasi pada capaian beberapa indikator makro, meliputi PDB, produksi, nilai tukar nelayan, infrastruktur dan ekspor impor sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap capaian kinerja pembangunan perikanan tangkap di Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perikanan tangkap dan menganalisis kinerja pembangunan perikanan tangkap di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran indikator makro menjadi prioritas untuk dicapai dalam pembangunan perikanan tangkap.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap beberapa capaian kinerja untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti (Azwar, 1998). Beberapa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, seperti instansi penelitian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pusat Statistik. Data sekunder yang digunakan ini berupa laporan hasil penelitian terkait, statistik statistik perikanan tangkap, data produk domestik bruto, ekspor impor perikanan dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, pemilihan prioritas indikator makro pembangunan perikanan tangkap dilakukan analisis menggunakan metode *urgency, seriousness and growth* (USG). Metode USG dilakukan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, dan kemungkinan berkembangnya masalah (Kepner & Tregoe, 1981).

Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia

Volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 adalah sebesar 7.248.297 ton, sedangkan perikanan budidaya pada tahun yang sama mencapai 17.248.384 ton. Volume produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010 sampai tahun 2018 sebesar 3,99% per tahun (di laut sebesar 4,02% per tahun), lebih kecil dibandingkan perikanan budidaya pada periode yang sama mencapai 14,16%. Namun, berdasarkan nilai produksi, perikanan tangkap lebih tinggi dibandingkan perikanan budidaya, yaitu sekitar 16 juta rupiah per ton untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya sekitar 9 juta rupiah per ton. Perkembangan volume dan nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya disajikan pada Tabel 1.

Aktivitas industri perikanan di Indonesia terdiri dari industri perikanan skala kecil dan skala besar. Berdasarkan penggunaan ukuran armada penangkapan yang digunakan, industri perikanan tangkap di Indonesia masih di dominasi perikanan tangkap skala kecil. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2016 didefinisikan bahwa nelayan skala kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik tidak menggunakan kapal

Tabel 1. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya di Indonesia Tahun 2010 – 2018.

Tahun	Perikanan Tangkap		Budi Daya	
	Vol (Ton)	Nilai (Rp.Juta)	Vol (Ton)	Nilai (Rp.Juta)
2010	5.384.418	64.549.401	6.277.923	63.329.191
2011	5.714.271	70.031.283	7.928.962	66.549.923
2012	5.829.194	79.393.325	9.675.553	75.922.767
2013	6.115.377	101.328.538	13.300.906	96.036.078
2014	6.484.346	108.528.920	14.359.129	127.695.038
2015	6.677.802	120.577.943	15.634.093	121.560.604
2016	6.580.191	122.220.566	16.002.319	146.654.071
2017	7.071.452	197.337.071	16.114.217	187.148.975
2018 ^{*)}	7.248.297	NA	17.248.384	NA

^{*)} angka estimasi hingga Triwulan IV-2018
Sumber : KKP (2019)

penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 *gross tonnage* (GT).

Besarnya dominasi nelayan skala kecil pada industri penangkapan ikan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan data statistik (2017) diketahui jumlah total armada berukuran kurang dari 10 GT berjumlah 508.551 unit atau sebesar 94%. Pada periode yang sama, sebanyak 68,42% armada perikanan tersebut adalah perahu tanpa motor dan motor tempel. Kajian Hermawan (2006) menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda, bahwa perikanan tangkap nasional masih dicirikan sebagai perikanan tangkap skala kecil. Widodo (2009) berpendapat bahwa nelayan skala kecil identik dengan kemiskinan dan selalu kalah bersaing dengan kapal besar dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Kedua hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sebagian besar nelayan Indonesia masih tidak terlepas dari kemiskinan dan belum berdaya saing. Mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014, maka wewenang pengelolaan armada penangkapan tersebut berada di pemerintahan provinsi. Peningkatan skala armada menjadi salah satu program utama yang harus dilaksanakan, sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan skala armada adalah program bantuan kapal berukuran > 30 GT dengan tujuan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa nelayan skala kecil selalu identik dengan teknologi tradisional, hasil yang subsisten dan kemiskinan (Satria, 2009; Sharma 2011) sehingga peningkatan skala usaha penangkapan menjadi salah satu prioritas utama untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap. Upaya peningkatan taraf hidup nelayan skala kecil salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antar aspek berkelanjutan yang terlibat dalam perikanan skala kecil (Chesson, Clayton & Whitworth, 1999). Sementara itu, Widodo & Suadi (2006) mengemukakan bahwa sistem perikanan disusun atas beberapa komponen yang memiliki berbagai bentuk interaksi kompleks dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun faktor-faktor penting yang terlibat dalam membangun keberlanjutan perikanan tangkap menurut FAO (1999) mencakup empat aspek penting, yakni

ekonomi, sosial, ekologi, dan kelembagaan. Sharma (2011) menyebut bahwa salah satu sumber penyebab terpuruknya perikanan tangkap skala kecil adalah akibat adanya keterbelakangan teknologi dan sosial. Smith (1993) menyatakan bahwa dasar perbedaan tersebut mencakup perikanan skala kecil atau skala besar, perikanan pantai atau lepas pantai, perikanan artisanal atau komersial. Penggolongan jenis skala perikanan tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini mengingat dimensinya yang cukup luas.

Kondisi perikanan tangkap skala kecil yang lebih dominan mengakibatkan sebagian besar produksi perikanan tangkap disuplai dari kegiatan perikanan tangkap skala kecil. Disisi lain, eksploitasi perikanan secara berlebihan dan degradasi lingkungan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan perikanan tangkap skala kecil ini belum dikelola dengan baik dan banyak tidak tercatat secara baik dari sisi input maupun outputnya. Menurut Berkes, Mahon & McConney (2008), pengelolaan perikanan tangkap skala kecil yang tidak baik akan mengakibatkan konflik sehingga tidak mampu mengimbangi kecepatan kemajuan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan dan kemiskinan. Hal serupa dikemukakan Kittinger (2013) bahwa perekonomian perikanan skala kecil berada dalam kondisi yang sangat buruk karena kurangnya daya saing menghadapi berbagai ancaman lokal dan global, kerentanan sosial, tekanan terkait resiko pekerjaan, ketahanan pangan, kesejahteraan dan gaya hidup tradisional masyarakat pesisir dan budaya (Kittinger, 2013). Namun demikian, perikanan skala kecil memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, mata pencaharian dan angka kemiskinan (Barnes, Oleson & Zafindrasilivonona, 2013).

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia selama ini banyak isu-isu mendesak yang perlu mendapat perhatian, antara lain pertambahan jumlah penduduk di wilayah pesisir yang cukup pesat dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masih banyaknya praktek pemanfaatan sumber daya perikanan yang merusak dan ilegal, tidak seimbangny pemanfaatan sumber daya antar kawasan dan jenis, adanya pemahaman yang sempit dalam implementasi otonomi daerah serta belum lengkapnya peraturan operasional, dan belum sinerginya pemanfaatan sumber daya perikanan

dalam satu kesatuan kebijakan dan perencanaan yang komprehensif.

Pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia telah dipetakan menjadi wilayah pengelolaan perikanan menurut penyebaran stok ikan dan karakteristik oseanografinya yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Pembagian wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) merujuk pada Permen KP Nomor: 18/Permen-KP/2014 yang terdiri atas 11 (sebelas) WPP. Pembagian ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pengelolaan perikanan tangkap antar daerah yang memiliki potensi sumber daya ikan sehingga pengelolaan ekonomi perikanan tangkap di setiap wilayah dapat berjalan secara lebih efektif.

Beberapa landasan hukum terkait pengelolaan perikanan di Indonesia antara lain: (1) UUD RI tahun 1945 pasal 33, (2) Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention of Law of the Sea*) tahun 1982 pasal 6, (3) *United Nation Stock Agreement* oleh FAO tahun 1995, (4) *Code of Conduct for Responsible Fisheries* oleh FAO tahun 1995 tentang Pengelolaan Perikanan Bertanggung Jawab, (5) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No 45 Tahun 2009, dan (6) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan nuansa baru pembangunan perikanan di daerah, maka upaya pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi daerah, termasuk sumber daya di wilayah pesisir, mulai mendapat perhatian. Arti penting dari UU tersebut adalah bahwa daerah memiliki otoritas yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan sudah bergeser dari sentralistik ke desentralistik. Menurut Suhana (2009), perubahan paradigma pembangunan pesisir dan lautan dari pola sentralistik ke desentralistik atau istilah lainnya kebijakan kelautan berbasis otonomi daerah, maka sebagai konsekuensinya pemerintah kabupaten/kota kini telah memiliki kewenangan (*authority*) yang lebih besar dalam sistem pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Pemerintah Daerah diharapkan akan lebih berupaya untuk mengedepankan

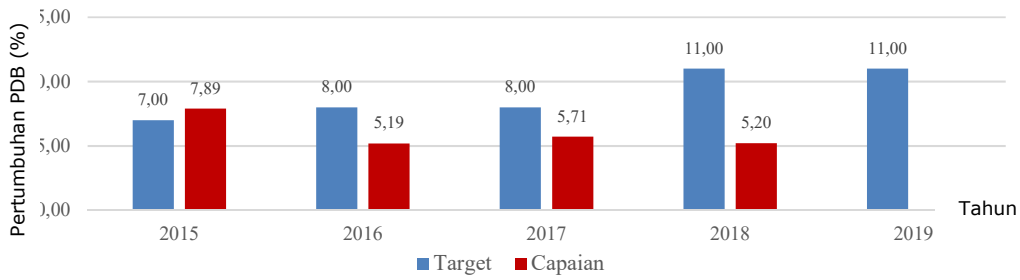
aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat lokal, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir setempat, terutama masyarakat adat.

Capaian Pembangunan Perikanan Tangkap

Salah satu sasaran target pembangunan perikanan adalah mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui penciptaan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan sumber daya ikan. Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2015-2019 mengusung visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju dan berbasis kepentingan nasional” yang dijabarkan kedalam tiga misi, yakni kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Target pembangunan perikanan tangkap sendiri difokuskan pada kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan (KKP, 2017). Pada kajian ini kinerja pembangunan perikanan tangkap dilakukan pada beberapa indikator makro, seperti capaian PDB perikanan, Nilai Tukar Nelayan, Infrastruktur dan perdagangan internasional (ekspor-impor).

1. Pertumbuhan PDB Perikanan

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2018 hanya mencapai 47,27% dari target yang telah ditetapkan. Perekonomian perikanan sampai dengan 2018 tumbuh rata-rata sebesar 5,20% (Gambar 1) atau berkontribusi sebesar 385,94 triliun rupiah. Jika mengacu pada PDB satelit tahun 2010-2015, maka kegiatan perikanan tangkap rata-rata berkontribusi sebesar 49,64% terhadap perolehan PDB perikanan. Besar kecilnya pertumbuhan PDB menurut Indonesia Investment dipengaruhi banyak hal, antara lain pertumbuhan ekonomi global yang lambat, menurunnya harga komoditas, tingkat suku bunga Bank Indonesia yang tinggi dan juga kondisi perpolitikan di Indonesia. Perkembangan target dan realisasi pertumbuhan PDB perikanan tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2015-2019.

Sumber : KKP (2019)

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum dan familiar bagi masyarakat karena dapat dengan mudah diukur secara kuantitatif dan menstimulus aspek pembangunan lainnya (Lincoln, 2010). Kenaikan persentase PDB perikanan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi berupa kenaikan pendapatan (total maupun individu) pada perikanan sebagai akibat meningkatnya PDB tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan adanya peningkatan bagian pendapatan yang dapat ditabung (Kholis, Astuti & Febrianti, 2016). Pertumbuhan ekonomi terus berjalan secara berdampingan dan terencana sehingga dapat menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan pembagian hasil-hasil pembangunan yang lebih merata. Jika hal ini berlangsung secara berkelanjutan, maka perikanan akan terus terpacu untuk terus tumbuh dan berkembang. Wilayah atau daerah yang memiliki perikanan yang semula tidak produktif dan tertinggal maka akan memiliki peluang untuk maju dan memiliki produktivitas yang sama atau bahkan lebih baik dari wilayah atau daerah lainnya. Pertumbuhan perikanan jika dibandingkan dengan sektor pertanian maupun nasional relatif lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tidak tercapai. Peningkatan pertumbuhan PDB hendaknya diikuti dengan peningkatan pendapatan nelayan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dermoredjo dan Noekman (2009) yang mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pertumbuhan

ekonomi belum mencerminkan kinerja secara riil sehingga perlu digunakan indikator lainnya.

2. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan. Angka capaian NTN diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Capaian NTN pada tahun 2018 adalah sebesar 114,17 atau 102% dari target yang telah ditetapkan sebesar 112. Perkembangan nilai tukar nelayan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.

Capaian angka NTN sangat dipengaruhi indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), dimana fluktuasi kedua indeks menyebabkan fluktuasi angka NTN. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka NTN sebesar 100, apabila di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan dikatakan sejahtera apabila di atas 100. Indeks nilai yang diterima nelayan dipengaruhi harga dan jumlah produksi bulanan sedangkan nilai indeks yang dibayarkan nelayan dipengaruhi biaya operasional penangkapan dan konsumsi rumah tangga, baik pangan dan non pangan. Ramadhan, Firdaus & Wijaya (2014) menyebut perubahan nilai tukar nelayan khususnya pada indeks harga yang diterima dipengaruhi perubahan harga berlaku. Indeks nilai yang dibayar lebih banyak dipengaruhi pengeluaran usaha (biaya tetap dan tidak tetap) dan pengeluaran rumah tangga pangan (Firdaus & Witomo, 2014). Perubahan NTN berimplikasi pada naik-turunnya kondisi ekonomi dan aktivitas

Tabel 2. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2015 – 2019.

Indikator	2015		2016		2017		2018		Target 2019
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
NTN	104,5	106,14	105	108,24	109	111,02	112	114,17	113

Sumber : BPS (2019)

masyarakat nelayan (Ramadhan *et al.*, 2014). Jika dilihat dari hasil capaian NTN selama kurun waktu 5 tahun terakhir, maka capaian tahun 2018 menunjukkan kondisi ekonomi rumah tangga nelayan yang lebih baik dibandingkan tahun lainnya.

Perubahan nilai tukar harus disikapi dengan suatu kebijakan yang tepat agar nelayan, khususnya anak buah kapal (ABK) sebagai pelaku penangkapan ikan pada level terendah dapat tetap mencukupi kebutuhan hidupnya sepanjang tahun. Fluktuasi nilai tukar memberikan ilustrasi bahwa selama musim paceklik (tidak ada ikan), umumnya nelayan tidak memiliki alternatif mata pencaharian lain sehingga nilai tukar akan cenderung terus menurun (Ramadhan *et al.*, 2014; Firdaus & Witomo, 2014). Pertumbuhan nilai tukar nelayan yang positif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa indeks yang diterima nelayan lebih besar dibandingkan indeks yang dibayarkan. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendapatan dari hasil penangkapan ikan masih “surplus” jika dibandingkan pengeluaran hidupnya. Tentu saja hal tersebut harus didukung informasi terkait produksi dan harga yang positif. Peningkatan nilai tukar nelayan pada beberapa daerah harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas nelayan dalam mengelola keuangan sehingga pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan tepat sasaran.

3. Produksi

Total produksi perikanan tangkap secara nasional tahun 2018 mencapai 7.248.297 ton dengan tingkat pertumbuhan produksi tahun 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 7,87% per tahun. Namun demikian, tingginya target produksi yang ditetapkan membuat produksi perikanan tangkap masih dibawah target tersebut. Jumlah produksi ikan yang tertangkap dan didaratkan di pelabuhan perikanan di Indonesia berdasarkan WPP diketahui bahwa produksi tertinggi terdapat di WPP 712. Adanya otonomi daerah mendorong adanya kontribusi pemerintah daerah untuk mengeksplor daerah secara optimal untuk membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Untuk mendukung implementasi peran pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, sejumlah peraturan pemerintah telah diadakan, yakni: Permen KP No. 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP, Permen KP No. 30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI.

Atas dasar kedua peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung No. 11 tahun 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan.

Beberapa upaya lain dalam pengelolaan sumber daya ikan laut di Indonesia antara lain pengadaan fasilitas penunjang untuk aktivitas industri perikanan dan penangkapan ikan. Fasilitas penunjang yang dimaksud antara lain galangan kapal, bengkel kapal dan tempat pelelangan ikan (TPI), pelabuhan perikanan, pabrik es, balai pengujian hasil perikanan dan stasiun karantina ikan. Dalam upaya distribusi hasil tangkapan, pemerintah kota, telah bekerja sama dengan masyarakat dan industri untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Kebanyakan yang membeli adalah pedagang-pedagang besar. Dari pedagang besar diteruskan ke pedagang pengecer dan disalurkan ke konsumen, sebagian hasil tangkapan ikan langsung dijual ke perusahaan perikanan. Adapun hasil tangkapan yang langsung dari industri perikanan, tidak dilelang lagi melainkan hanya bongkar muat ikan sesampainya di TPI.

Hasil pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya komoditas ikan Indonesia berhasil memengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam optimasi pemanfaatan. Potensi stok atau jumlah sumber daya ikan di perairan laut Indonesia mengalami tren yang menaik. Hal ini dapat dilihat dari penetapan potensi stok sumber daya ikan oleh KKP mulai tahun 1997. Dalam periode 20 tahun terakhir, terjadi kenaikan tren potensi stok lebih dari 102%, yaitu 6,19 juta ton pada tahun 1997 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 (Kepmen KP 50/2017). Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Konnaskajiskan), menyebut peningkatan potensi stok ikan karena beberapa hal, antara lain: semakin luasnya cakupan data, pengumpulan dan kualitas data yang semakin baik, penggunaan metode pengkajian stok ikan bertambah dan saling melengkapi, tindakan pengelolaan (seperti pembatasan kuota dan moratorium penangkapan, pemberantasan *IUU fishing* dan penghentian izin pada kapal asing dan eks-asing), dan semakin luasnya kawasan konservasi perairan laut (KKP, 2018).

Kenaikan potensi stok sumber daya ikan di Indonesia memberikan gambaran indikator

bahwa produksi tangkapan ikan pun menjadi lebih tinggi. Berdasarkan data statistik, diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2018 di laut mencapai 6.716.050 ton, meningkat dibandingkan tahun 2006 hanya sekitar 4.512.191 ton.

Sebagaimana halnya dengan pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor perikanan masih bersifat dispersal, yang dicirikan tidak adanya hubungan fungsional, diantara tingkatan dan jaringan perikanan hanya diikat dan dikoordinasi mekanisme pasar. Pelaku usaha cenderung mementingkan diri sendiri dan eksploitatif, sedangkan pelaku sektor hilir cenderung dominan dan mengeksploitasi pelaku usaha sektor hulu. Perkembangan produksi perikanan tangkap di laut menurut komoditas utama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.

4. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pembangunan infrastruktur laut merupakan salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan pesisir. Pembangunan ini tentunya harus memiliki sifat yang berkelanjutan dan menunjang dari segi potensi laut dan masyarakatnya. Salah satu infrastruktur laut yang memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah pesisir adalah pelabuhan. Menurut Murdiyanto (2004) pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Fungsi pelabuhan seperti *interface*, merupakan tempat dua moda/sistem transportasi, yaitu

transportasi laut dan transportasi darat, sehingga pelabuhan merupakan mata rantai dan sistem transportasi. Pelabuhan juga berfungsi sebagai pintu masuk atau pintu keluar barang dari negara atau daerah tersebut, dan industry entity (entitas industri) yang berarti perkembangan industri berorientasi ekspor dari suatu negara (Triatmodjo, 2003).

Salah satu jenis pelabuhan yang dibutuhkan masyarakat pesisir adalah pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Secara nasional ada sebanyak 538 fasilitas terkait pelabuhan atau pendaratan ikan untuk bongkar muat hasil tangkapan. Mayoritas masih dalam kelas sentra nelayan (374 unit), yaitu tempat aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ikan yang telah berkembang di masyarakat sejak dulu. Pengelolaan sentra nelayan lebih kental dengan pengelolaan yang bersifat lokal, berbeda untuk setiap daerah tergantung kebiasaan wilayah tersebut. Berdasarkan Permen KP No. PER.08/MEN/2012, pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) kategori dilihat dari kapasitas dan kemampuannya dalam menangani kapal yang datang dan pergi serta letak, luasan dan posisi pelabuhan, yaitu: PPS (pelabuhan perikanan samudera), PPN (pelabuhan perikanan nusantara), PPP (pelabuhan perikanan pantai), dan PPI (pangkalan pendaratan ikan). Perkembangan jumlah sarana dan perikanan tangkap terkait bongkar muat hasil tangkapan di Indonesia tahun 2018 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama Tahun 2014-2018.

Komoditas utama	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018**
Udang	262.555	268.047	291.738	400.073	418.254
Tuna	313.873	255.452	273.336	293.233	306.559
Cakalang	496.682	415.060	440.812	467.548	488.795
Tongkol	515.571	524.387	476.233	471.009	492.913
Ikan selain Tuna, Cakalang, Tongkol	3.988.564	4.121.272	4.078.425	4.304.948	5.009.530
Lainnya	460.409	620.451	554.925	666.819	-
Jumlah	6.037.654	6.204.668	6.115.469	6.603.631	6.716.050

***) Angka estimasi s/d Triwulan IV-2018
Sumber: Pusdatin KKP (2019)

Tabel 4. Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Terkait Bongkar Muat Hasil Tangkapan di Indonesia Tahun 2018.

Jenis Pelabuhan	Jumlah
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	7
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	17
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	34
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	12
Pelabuhan Perikanan Swasta	2
Sentra Nelayan	374
Penetapan Kelas	92
Jumlah	538

Sumber: DJPT (2019)

Jika dibandingkan negara lain, seperti Jepang yang memiliki luas wilayah laut lebih kecil dibandingkan Indonesia, tetapi memiliki pelabuhan perikanan sebanyak 2.944 unit (National Fishing Port Association Japan, 1995). Di Filipina, pelabuhan perikanan General Santos Filipina merupakan salah satu pelabuhan yang berjarak 3 km dengan bandara atau landasan pesawat terbang sehingga sehari-hari dapat digunakan untuk mengekspor ikan ke luar negaranya (Mahyudin, 2004). Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain dalam hal sarana dan prasarana, sehingga berdampak terhadap pembangunan dan daya saing perikanan tangkap.

5. Ekspor dan Impor

Permintaan ekspor komoditas perikanan di Indonesia masih cukup tinggi dan berbagai usaha penangkapan dan produksi semakin ditingkatkan guna memenuhi pangsa pasar. Penghasil ekspor perikanan tangkap di Indonesia tidak hanya berasal perusahaan dalam negeri namun juga berasal dari perusahaan milik asing yang ada di Indonesia. Adanya kebijakan pelarangan penggunaan kapal penangkapan ikan asing dan eks asing di perairan Indonesia tahun 2014 berdampak besar terhadap penurunan jumlah perusahaan penangkapan ikan milik asing di Indonesia. Penurunan jumlah perusahaan milik

asing (PMA) pada tahun 2014-2017 memberikan stimulus positif untuk pelaku usaha dalam negeri untuk berkembang dapat dilihat pada Tabel 5

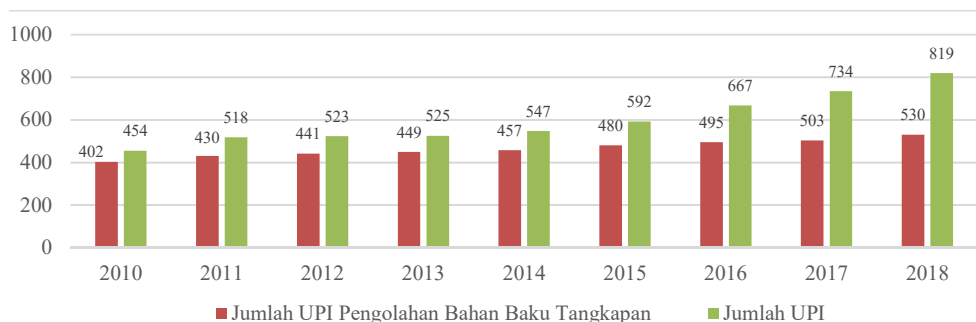
Tabel 5. Perkembangan Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan di Indonesia Berdasarkan Status Kepemilikannya.

Tahun	Status Permodalan			Jumlah
	PMA	PMDN	Lainnya	
2010	9	21	25	55
2011	10	24	28	62
2012	9	32	33	74
2013	11	40	33	84
2014	13	24	49	86
2015	13	50	23	86
2016	11	65	19	95
2017	9	84	29	122

Sumber: BPS (2018)

Produksi perikanan perikanan tangkap di Indonesia masih di dominasi jenis ikan pelagis kecil, yaitu mencapai 1,92 juta ton, sedangkan pelagis besar mencapai 1,46 juta ton dan 1,58 juta ton merupakan ikan demersal. Komoditas pelagis kecil didominasi jenis teri, layang, kembung dan tembang, sedangkan pelagis besar didominasi: tuna, tongkol, cakalang dan layar, dan jenis kakap dan manyung yang mendominasi jenis ikan demersal. Hasil produksi perikanan tangkap di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan untuk keperluan industri dan konsumsi lokal. Berbagai industri mulai dari skala kecil hingga skala besar berpacu untuk memanfaatkan komoditas perikanan tangkap, terlihat dari peningkatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) pengolahan perikanan berbahan baku ikan hasil tangkapan, dari sebanyak 402 unit pada tahun 2010 menjadi 530 unit pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 32% (Gambar 2).

Jumlah UPI pengolahan berbahan baku ikan hasil tangkapan mendominasi industri pengolahan perikanan. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan besar antara industri



Gambar 2. Perkembangan Jumlah UPI Pengolahan Bahan Baku Tangkapan di Indonesia Tahun 2010-2018.

Sumber : KKP (2019)

perikanan tangkap dengan industri pengolahan, yaitu penurunan produksi penangkapan ikan akan memengaruhi industri pengolahan. Secara nasional jumlah UPI pengolahan perikanan berbahan baku ikan hasil tangkapan pada tahun 2018 mencapai 64,71% dari total seluruh UPI yang ada. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 88,5%. Penurunan persentase jumlah UPI berbahan baku ikan hasil tangkapan menunjukkan adanya peningkatan jumlah UPI tidak sebanding dengan jumlah hasil tangkapan sehingga dikonversi dengan ikan hasil budidaya, seperti udang dan bandeng. Perkembangan jumlah UPI pengolahan bahan baku tangkapan di Indonesia tahun 2008-2018 disajikan pada Gambar 2.

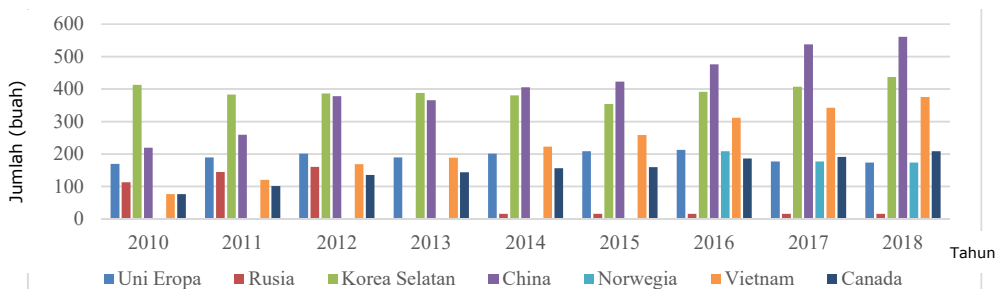
Perdagangan internasional merupakan salah satu variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor (Jin & Koo, 2003). Sebagai negara yang menganut ekonomi terbuka, Indonesia melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan berbagai skema dan kerangka kesepakatan, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Trend ekspor produk perikanan ke China pada Tahun 2015-2018 terus meningkat dibandingkan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan pasar perikanan dengan China, meskipun pasar Amerika Serikat dan Jepang masih mendominasi tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Peningkatan jumlah *Approval Number* selama tahun 2010-2018 di beberapa negara, seperti China, Korea Selatan, Vietnam dan Kanada menunjukkan adanya peluang ekspor produk perikanan meningkat di beberapa negara tersebut sebagai bagian dari adanya kesamaan sistem jaminan mutu melalui manajemen HACCP.

Pada tahun 2014, ekspor produk perikanan Vietnam (HS03) diperingkat ke-3 dunia (menguasai 5,10% pangsa pasar dunia), sedangkan China memimpin dengan 12,45% penguasaan pasar ekspor produk perikanan (HS03). Pada Tahun

2018, posisi Vietnam turun menjadi peringkat ke-5 dunia (4,44%) digeser India (5,09%) dan Chile (4,73%), dan China masih terus memimpin (10,62%). Ekspor produk perikanan Indonesia sendiri menunjukkan performa penurunan, baik dari sisi peringkat maupun penguasaan pasar dunia, yaitu peringkat ke-10 dengan penguasaan pasar sebesar 2,75% pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-12 dengan penguasaan pasar dunia sebesar 2,65% pada tahun 2018.

Berdasarkan indeks RCA (*Revealed Comparative Advantage*), kinerja ekspor (*export performance*) produk perikanan Indonesia (HS03) memiliki keunggulan komparatif pada perdagangan ekspor perikanan dunia. Nilai tertinggi RCA ekspor produk perikanan Indonesia terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 3,17, dibandingkan tahun 2014 sebesar 2,97 dan kembali turun menjadi 2,83 pada tahun 2018. Nilai indeks RCA ekspor produk perikanan Indonesia yang lebih dari satu (>1) menggambarkan bahwa ekspor produk perikanan memiliki keunggulan komparatif diatas rata-rata dunia, sebaliknya apabila indeks RCA ekspor produk perikanan kurang dari satu (<1), berarti ekspor produk perikanan negara tersebut mempunyai daya saing yang lebih rendah dari rata-rata dunia.

Pasar utama produk perikanan Indonesia selama Tahun 2014-2018 adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Thailand. Pada tahun 2014, Amerika Serikat memimpin pasar produk perikanan Indonesia (HS03) sebesar 41,98% (USD 1,31 milyar) dan sebesar 39,98% (USD 1,32 milyar) pada tahun 2018. Penurunan pasar produk perikanan Indonesia secara signifikan terjadi pada Thailand, Tahun 2014 sebesar 4,78% (USD 1,48 juta) menjadi 2,69% (USD 889 ribu) pada Tahun 2018. Negara potensial yang terus mengalami peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia pada periode yang sama adalah Vietnam (4,08%), Taiwan (3,45%) dan Hongkong (2,76%).



Gambar 3. Jumlah *Approval Number*/Registrasi ke Negara Mitra Tahun 2010 – 2018. Sumber : KKP (2019)

Tabel 6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Komoditas Perikanan Periode Tahun 2012-2018.

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca	
	Volume (Ton)	Nilai (US\$ 1000)	Volume (Ton)	Nilai (US\$ 1000)	Volume (Ton)	Nilai (US\$ 1000)
2012	1.240.089	3.871.341	371.007	457.579	869.082	3.413.762
2013	1.255.418	4.161.354	353.474	461.957	901.944	3.699.397
2014	1.273.227	4.641.536	306.511	417.236	966.716	4.224.300
2015	1.076.204	3.943.701	291.599	378.351	784.605	3.565.349
2016	1.075.195	4.172.253	277.472	414.263	797.723	3.757.990
2017	1.077.998	4.513.742	386.330	474.664	691.668	4.039.079
2018*)	1.126.068	4.860.904	304.117	459.988	821.951	4.400.915

*) angka sementara sd Desember 2018

Sumber: KKP (2019)

Berdasarkan Tabel 6, rata-rata ekspor produk perikanan tahun 2012-2018 sebesar 1,16 juta ton per tahun atau rata-rata menurun 1,37%, tetapi dari sisi nilai naik 4,46%. Volume impor pada periode yang sama di kisaran 3,27 ribu ton atau rata-rata turun 1,68% per tahun. Tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia menurut volume adalah China (32,45%), Amerika Serikat (17,53%), Jepang (9,64%), Thailand (5,14%) dan Taiwan (3,37%). Namun dari sisi nilai penerimaan ekspor Tahun 2018 masih didominasi Amerika Serikat (38,61%), diikuti Jepang dan China masing-masing 13,9%. Kinerja pertumbuhan ekspor produk perikanan Indonesia di beberapa negara selama periode 2017-2018, hanya China (29,19%) dan Amerika Serikat (6,15%) yang masih memiliki pertumbuhan positif, lainnya mengalami pertumbuhan negatif, seperti Jepang (-10,18%), Taiwan (-4,84%) dan Thailand (-20,95%). Lonjakan pertumbuhan ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2014-2018 terjadi di Polandia (82,68%), Slovenia (45,73%), Rusia (30,22%), Yunani (30%) dan Kanada (12,76%).

Berdasarkan volume ekspor, komoditas ekspor utama periode 2012-2018 adalah udang, TTC (tuna, tongkol, cakalang), rumput laut, kepiting dan lobster. Data statistik menunjukkan terjadi pergeseran produk utama yang diekspor, dari TTC pada tahun 2012-2015, menjadi udang dan rumput laut selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan nilai ekspor, komoditas perikanan menurut nilai pada periode 2012-2018 didominasi udang (35,83%),

TTC (14,68%) dan kepiting (9,72%). Sebaliknya, Indonesia umumnya mengimpor produk perikanan dari China (28,55%), Korea Selatan (10,09%), Amerika Serikat (9,26%), Thailand (8,66%) dan Pakistan (5,47%) yang sebagian besar digunakan untuk tepung ikan. Selama periode 2017-2018, pertumbuhan impor dari beberapa negara tersebut mengalami pertumbuhan negatif, kecuali Thailand (88,99%) yang mengalami pertumbuhan positif. Negara mengekspor produk perikanan ke Indonesia adalah China (20,73%), Amerika Serikat (9,53%) dan Korea Selatan (6,74%). Neraca perdagangan produk perikanan selama Tahun 2012-2018 menunjukkan surplus rata-rata sebesar 4,81% dan 5,85%.

Prioritas Indikator Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat capaian kinerja pembangunan perikanan tangkap diatas selanjutnya dianalisis menggunakan metode USG guna menentukan indikator prioritas utama. Indikator capaian kinerja pembangunan perikanan tangkap yang telah disampaikan terdiri atas pertumbuhan PDB perikanan, nilai tukar nelayan, produksi, sarana dan prasarana perikanan, dan ekspor-impor. Hasil analisis menunjukkan seluruh indikator termasuk kedalam kategori "sangat prioritas", seara lengkap penentuan prioritas indikator menggunakan metode USG disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penentuan Prioritas Indikator menggunakan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth).

No	Indikator	Urgency	Seriousness	Growth	Total	Kategori	Peringkat
1	Pertumbuhan PDB Perikanan	3,95	3,89	3,58	11,42	SP	2
2	Nilai Tukar Nelayan	3,68	3,89	3,68	11,26	SP	3
3	Produksi	3,89	4,00	3,74	11,63	SP	1
4	Sarpras Perikanan (pelabuhan)	3,95	3,74	3,32	11,00	SP	4
5	Ekspor Impor	3,74	3,68	3,47	10,89	SP	5

Hal ini menunjukkan indikator yang dianalisis merupakan indikator prioritas dalam capaian pembangunan perikanan tangkap. Indikator prioritas pertama sampai dengan terakhir adalah sebagai berikut: produksi, pertumbuhan PDB perikanan, nilai tukar nelayan, sarana dan prasarana perikanan, dan ekspor-impor. Produksi menjadi indikator utama untuk melihat capaian kinerja pembangunan perikanan tangkap. Indikator produksi juga berdampak terhadap indikator lainnya, seperti pertumbuhan PDB (yang memiliki hubungan erat dengan produksi), nilai tukar nelayan (pendapatan yang merupakan konversi dari hasil tangkapan) dan dukungan sarana-prasarana terhadap aliran produksi, pemasaran hingga konsumsi.

PENUTUP

Perikanan tangkap di Indonesia sebesar 94% masih di dominasi nelayan skala kecil sehingga menunjukkan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia masih belum optimal. Jika dilihat dari indikator produksi, perikanan tangkap mengalami pertumbuhan terus meningkat, rata-rata tumbuh 8,7% selama tahun 2012-2018. Kinerja pembangunan perikanan tangkap lain dari indikator makro menunjukkan beberapa capaian, antara lain: pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2018 hanya mencapai 34% dari target yang telah ditetapkan, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 5,20%, NTN tahun 2018 sebesar 114,17 atau 102% dari target yang ditetapkan sehingga mengindikasikan nelayan sejahtera, 538 fasilitas terkait pelabuhan mayoritas masih dalam kelas sentra nelayan (374 unit), dan ekspor produk perikanan menunjukkan performa penurunan.

Indeks RCA produk perikanan Indonesia adalah sebesar 2,83 (2018), menunjukkan export performance HS03 memiliki keunggulan komparatif dalam perdagangan dunia. Pasar utama produk perikanan Indonesia selama tahun 2014-2018 adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Thailand. Penurunan pasar ekspor produk perikanan Indonesia secara signifikan terjadi pada Thailand, sedangkan negara potensial terus mengalami peningkatan ekspor adalah Vietnam, Taiwan dan Hongkong. Produksi, pertumbuhan PDB perikanan dan nilai tukar nelayan menjadi tiga indikator prioritas utama dalam melihat capaian pembangunan perikanan tangkap di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan perikanan tangkap dapat tingkatkan kembali dari kondisi existing. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: (1) peningkatan kapasitas armada penangkapan (ukuran, alat tangkap dan teknologi), (2) peningkatan kontribusi perikanan tangkap terhadap PDB perikanan melalui peningkatan produktivitas tangkapan dan nilai ekspor, (3) menjaga kestabilan harga produksi (harga jual ikan di tingkat produsen/nelayan), (4) percepatan pertumbuhan kinerja ekspor perikanan melalui perluasan pasar potensial, (5) pemerataan distribusi manfaat sumberdaya perikanan melalui pendekatan *chain of command* untuk menghindari kesimpangsiuran kewenangan dengan memperkuat kelembagaan WPP, dan (6) peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan (jumlah dan kapasitas) seiring meningkatnya permintaan jasa pelabuhan perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan atas kesempatan studi dan melakukan penelitian, Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika IPB atas kesempatan mengenal lebih jauh dan memperkaya khazanah kelautan dan perikanan dalam persepektif ekonomi sumberdaya, serta para dosen pembimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi, para responden di pusat dan daerah yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mengisi angket penelitian, serta segenap tim redaksi Buletin Marina yang telah membantu menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L. (2005). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pulau-pulau Kecil*. Working Paper. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) (ID).
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [BAPPENAS]. (2014). *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/BAPPENAS. Jakarta
- _____. (2016). *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs*. Disampaikan dalam Acara Workshop Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- dan Jakarta Coral Initiatives Jakarta, 22 November 2016.
- Barnes, M.M., Oleson K.L. & Zafindrasilivonona B. (2013). The Total Economic Value of Small-Scale Fisheries with a Characterization of Post-Landing Trends: An Application in Madagascar with Global Relevance. *Fisheries Research* 147:175-85
- Berkes, F., Mahon, R & McConney P. (2008). *Mengelola Perikanan Skala Kecil "Arah dan Metode Alternatif"*. Lindayati R, Rahman D, penerjemah. Ottawa (CA): Inter-national Development Research Centre Canada.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2018). *Statistik Perusahaan Perikanan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta (ID) : BPS
- _____. (2018). *Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta (ID) : BPS
- Chesson, J., Clayton, H & Whitworth, B. (1999). *Evaluation of Fisheries Management systems with Respect to Sustainable Development*. ICES Journal of Marine Science, 56: 980–984
- Daryanto, A. (2007). *Dari Klaster menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan*. Buletin Craby dan Starky, Edisi Januari 2007.
- Dermoredjo, S.K & Noekman K. (2009). Analisis Penentuan Indikator Utama Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia: Pendekatan Analisis Komponen Utama. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan "Teori, Kebijakan dan Pengelolaan"*. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, M & Witomo, CM. (2014). Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol 9 No 2.
- [FAO] Food & Agriculture Organization. (2009). *FAO Tehcnical Guidelines For Responsible Fisheries*. Fisheries Management. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome (Ita) : FAO
- Hermawan, M. (2006). *Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil (Kasus Perikanan Pantai di Serang dan Tegal)*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Jin, HJ & Koo, WW. (2003). *Analysis of US Wheat Market Shares in East Asia*. Center of Agricultural Policy and Trade Studies. Agribusiness & Applied Economics Report No. 524. Department of Agribusiness and Applied Economics, North Dakota University.
- Kepner, C.H & Tregoe B.B. (1981). *Manajer yang Rasional Edisi Terjemahan*. Erlangga. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. (2007). *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*. Jakarta.
- _____. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta (ID) : KKP.
- _____. (2018). *Indonesia Capai Target Luas Kawasan Konservasi Perairan 20 Juta Ha Di Tahun 2018*. Retrieved: <https://kkp.go.id/djprl/kkhl/artikel/8214-indonesia-capai-target-luas-kawasan-konservasi-perairan-20-juta-ha-di-tahun-2018>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2019.
- _____. (2019). *KKP Dalam Angka 2018*. Pusat Data dan Informasi. Jakarta (ID): KKP
- _____. (2019). *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*. Jakarta (ID): KKP
- _____. 2019. *Data Penerbitan Health Certificate (HC). Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM*. Jakarta.
- KKP Kholis, M., Astuti, D & Febrianti, R. (2016). Hubungan Pendapatan Nasional dan Investasi di Indonesia (Suatu Kajian Ekonomi Makro dengan Model VAR). *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Volume 12 No.1.
- Kittinger, J.N. (2013). Human dimensions of small-scale and traditional fisheries in the Asia-Pacific region. *Pacific Science*. 2013 Jul;67(3):315-26.
- Kurniawan, T.F. (2010). *Analisis dan Reformasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia*.
- Kuznets, S. (1973). *Modern Economic Growth: Findings and Reflections*. The American Economic Review, 63(3), pp.247-258.
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahyudin, B. (2004). *Overseas Training on Community Based Fisheries Resources Management in Philipines, General Santos, 5 – 8 December 2004*. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Mankiw, G. (2007). *Makro Ekonomi*. Edisi Keenam. Terjemahan. Erlangga. Jakarta
- Mopangga, H. (2010). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Disertasi. Sekolah Pasca

- Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Murdiyanto, B. (2004). *Pelabuhan Perikanan*. Edisi Pertama. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut pertanian Bogor. Bogor. 142 hlm.
- National Fishing Port Association. (1995). *Fishing Port of Japan*. National Fishing Port Association. hlm 11.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. PER.08/MEN/2012 Tentang Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/Permen-KP/2014, tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Ramadhan, A., Firdaus, M & Wijaya, R.A. (2014). Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) Pelagis Besar Tradisional. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* Vol 9 No 2.
- Satria, A. (2009). Pesisir dan Laut untuk Rakyat. Bogor: IPB Press.
- Sharma, C. (2011). Securing Economic, Social and Cultural Rights of Small-Scale and Artisanal Fisherworkers and Fishing Communities. Maritime Anthropological Studies. *Journal MAST* 2011, 10 (2) : 41-61
- Smith, S.J. (1993). Riks Evaluation and Biological Reference Point for Fisheries Management: A Review. In: Kurse, G. Raggars, D. M. Marasco, R.J. Pautzke, C. Quinn, T. J. (eds) Management Strategies for Exploited Fish Population. *Alaska Sea Grant, Anchorage*. Pp. 339 – 353.
- Solow, R.M. (1970). *Growth Theory*. An Exposition. In *Growth Theory. An Exposition..* Clarendon Press. Oxford
- Suhana. (2009). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Kearifan Lokal Desa Autubun, Maluku Tenggara Barat. *Bulletin Online* Edisi November - Desember 2009. ISSN 1978 - 1571.
- Sutiardi, E. (2001). *Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Pembangunan Wilayah Kota Bengkulu*. Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor.
- Soemokaryo, S. (2001). *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*. Dirjen Perikanan. Jakarta.
- Sukirno, S. (2000). *Makro ekonomi*. Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Todaro, M & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan H. Munandar. Edisi Kesembilan Jilid I. Erlangga. Jakarta.
- Triatmodjo, B. (2003). *Pelabuhan*. Beta Offset. Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5587. Tahun 2014. Jakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, tentang Yang Mengatur Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan NeMalayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870I Tahun 2016. Jakarta
- Widodo, J & Suadi. (2006). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widodo, S. (2009). Strategi Nafkah Rumah Tangga Nelayan dalam Menghadapi Kemiskinan. *Jurnal Kelautan*. Vol 2 No 2: 150-157

Lampiran 1. Perkembangan Jumlah Armada Kapal Motor Berdasarkan Ukuran Tahun 2000 – 2016.

Tahun	Kapal motor < 5 GT	Kapal motor 5 - 10 GT	Kapal motor 10 - 20 GT	Kapal motor 20 - 30 GT	Kapal motor 30 - 50 GT	Kapal motor 50 - 100 GT	Kapal motor 100 - 200 GT	Kapal motor 200 - 300 GT	Kapal motor 300 - 500 GT	Kapal motor 500 - 1000 GT	Kapal motor > 1000 GT
2000	65.897	19.460	5.599	2.974	1.543	95.004	118.519	92.624	0	0	0
2001	70.925	22.641	6.006	3.008	781	1.602	95.004	118.519	92.624	44	2
2002	74.292	20.208	5.866	3.382	2.685	2.430	1.612	95.004	118.519	92.624	1
2003	79.218	24.358	5.764	3.131	2.338	2.698	1.731	468	95.004	118.519	1
2004	90.148	22.917	5.952	3.598	800	1.740	1.342	272	121	95.004	1
2005	102.456	26.841	6.968	4.553	1.092	2.160	1.403	201	87	34	1
2006	106.609	29.899	8.190	5.037	970	1.926	1.381	218	116	32	1
2007	114.273	30.617	8.194	5.345	913	1.832	1.322	234	151	34	1
2008	107.934	29.936	7.728	5.200	747	1.665	1.230	227	147	30	2
2009	105.121	32.214	8.842	7.403	2.407	2.270	1.317	208	115	24	1
2010	110.163	31.460	10.988	7.264	2.495	2.347	1.462	254	125	28	1
2011	123.748	35.877	13.201	8.022	914	1.801	1.204	204	123	27	0
2012	137.587	37.694	11.583	7.611	916	1.640	1.169	217	100	21	0
2013	151.939	46.358	15.208	8.782	1074	1.727	1.127	358	0	0	0
2014	153.493	41.374	14.301	9.578	1029	1.766	840	176	0	0	0
2015	117.848	39.429	10.515	7.680	825	1.435	571	9	0	0	0
2016	115.814	35.988	9.790	6.481	805	2.008	847	11	0	0	0

Lampiran 2. Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI.

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI
1	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2	Fasilitas tambat/labuh kapal	>60 GT	30-60 GT	10-30 GT	3-10 GT
3	Panjang dermaga dan Kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100-150 m dan >2 m	50-100 m dan >2 m
4	Kapasitas menampung Kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT)	>60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)
5	Volume ikan yang didaratkan	rata-rata 60 ton/hari	rata-rata 30 ton/hari	-	-
6	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak
7	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	2-5 Ha
8	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/Tidak	Tidak	Tidak
9	Tata ruang (zonasi) pengolahan/ pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	Tidak